



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CATUR ENDAH PRASETIANI P
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 880955

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
2. Tanah Seluas 84 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	416.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOBIL, HONDA CITY MICRO MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
3. MOBIL, HONDA BRIO MINI BUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	680.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.321.511.912
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	5.667.511.912
III. HUTANG	Rp.	59.376.690
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.608.135.222



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.